

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Generasi Milenial dan Genrasi Z merupakan salah satu sumber daya dalam meningkatkan kualitas politik, terlebih dalam segmentasi kedaerahan, yang mana generasi milenial dan generasi Z adalah generasi produktif yang lahir dan besar di daerahnya serta tumbuh dengan pemahaman yang paling efektif menjadi generasi pertama yang menyadari sebuah persoalan dalam segmentasi daerah khususnya dalam persoalan politik. Politik secara etimologi juga merupakan kegiatan dari setiap rangkaian keputusan dalam wilayah kelompok atau kenegaraan, hal ini pun berlangsung bukan hanya dalam segmentasi besar seperti kenegaraan saja tetapi juga dalam lingkup antar kelompok (Apriyanti, 2009). Dalam mewujudkan hal itu perlu menyadari pentingnya sebuah proses menuju terwujudnya politik yang berkemajuan dan berkeidealan maka perlu tindakan yang dinamakan pendidikan politik sebagai alur utama penyadaran masyarakat terhadap penilaian politik,

Pendidikan politik merupakan sebuah konsep utama yang harus dijalani dalam sebuah perjalanan negara demokrasi, pendidikan politik juga bisa diartikan sebagai tujuan bagaimana pendidikan mampu meningkatkan kualitas politik serta partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara (Pasaribu, 2017). Pendidikan politik memiliki makna yang luas, jika mendengar kata pendidikan sebagian dari kita pasti berfikir terhadap penyelenggaraan gerakan formal, tetapi pada prakteknya pendidikan politik hadir secara tidak eksplisit baik dari beberapa platform media sosial yang merupakan pendidikan non formal yang termaktub dalam konten menghibur dan cukup singkat. Hal ini juga bisa saja disebabkan karena hampir tidak ada format khusus terhadap pendidikan politik dan juga luasnya makna politik sehingga tantangan terhadap pelaksanaan eksplisitas pendidikan politik

Jika mencari siapa yang mampu menjalani pelaksanaan pendidikan politik dengan segala akomodasi, fasilitas dan morilnya maka peran partai politik yang paling memungkinkan melakukan itu, tetapi menyerahkan sepenuhnya pendidikan

politik kepada partai politik juga bukan ide yang cukup baik karena mengingat adanya gejala ketidakpercayaan kepada partai politik oleh generasi milenial akhir dan generasi Z. Menurut (Lusyasa Akhrani, 2018) menunjukkan bahwa kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi berperan penting dalam partisipasi politik mahasiswa. Berdasarkan kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa adanya sebuah korelasi linear dalam kepercayaan terhadap dinamika politik dan juga partisipasi politik bagi pemilih pemula yang masuk dalam kategori generasi milenial dan juga generasi Z.

Generasi Milenial dan generasi Z penting karena merupakan generasi yang produktif, dalam kisaran usia 17-40, hal ini disebabkan juga oleh faktor biologis fisik di umur tersebut yang belum memiliki banyak masalah dalam beraktivitas dan berfikir. Di luar itu, milenial dan generasi Z juga memiliki perbedaan yang cukup mendasar terkait beberapa faktor seperti Generasi Z yang gemar melakukan komunikasi secara digital sedangkan milenial melakukan komunikasi secara tatap muka. Jika kita menganalisis lebih jauh maka milenial generasi akhir dan juga generasi Z juga merupakan generasi yang cenderung lebih terbiasa dengan teknologi, hal ini menyebabkan generasi milenial akhir dan juga generasi Z cenderung lebih inovatif karena menerima lebih banyak pemasokan informasi di era mereka dewasa, itu salah satu sebabnya generasi Z di kategorikan sebagai abjad terakhir dalam alphabet karena menandai adanya sebuah peranan akan akhir dari sebuah perjalanan konvensional baik dalam tradisi maupun peranan (Sladek & Grabiner, 2014).

Generasi Milenial merupakan generasi yang masih produktif, sebagaimana historisnya generasi ini adalah generasi yang pertama kali 2 pakar sejarah asal Amerika Serikat, William Strauss dan juga Neil Howe dalam beberapa karyanya (Strauss, 1991). Tidak ada penetapan pasti tahun berapa generasi milenial lahirnya tetapi Badan Pusat Statistik Indonesia atau lebih dikenal dengan BPS mengkategorikan bahwa generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996, yang mana dalam konteks produktivitas manusia yang lahir pada tahun tersebut merupakan manusia yang masih sangat dominan

dalam melakukan peningkatan kemajuan sebuah negara menjadi sebuah negara yang maju.

Serta tak luput juga generasi yang mengalami sebuah transformasi peredaran yang cukup masif dibandingkan generasi sebelumnya yaitu generasi Z, dalam bahasa kesehariannya di lingkungan sosial generasi ini dikenal dengan sebutan “GEN Z atau ZOOMERS” yang mana secara kalender generasi Z merupakan pengganti generasi milenial yang merupakan era yang persis hadir sebelum generasi Z, Generasi Z di kategorikan oleh kelahiran tahun 1997-2012. Pembahasan yang seolah menjadi dikotomi pembagian generasi yang dinamakan ini sudah populer digunakan para ahli dan akademisi pada 1990-2010 untuk menandakan sebuah pertanda kelahiran generasi sesuai zaman yang dihadapinya (Kingl, 2022). Generasi Z merupakan generasi pertama yang hadir di era perkembangan teknologi dan globalisasi yang masif, hal ini yang menjadikan generasi Z seperti generasi yang harus dipersiapkan dan dimatangkan dalam peningkatan visi besar Indonesia Emas 2045 karena adanya bonus demografi, dan salah satu peningkatan yang harus disiapkan adalah pemahaman terhadap politik nasional dan internasional agar terwujudnya demokrasi yang ideal.

Penulis melakukan riset di Kota Jambi. Riset dilakukan di dua dapil di Kota Jambi yaitu dapil Kota Baru dan juga dapil Alam Barajo. Dalam riset tersebut dari empat warga yang ditanyakan, dua diantaranya merupakan generasi Z pada pemilu 2024, semua menjawab tidak ada yang tahu tentang siapa yang mewakili mereka di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Jambi. Padahal, jika melihat definisi pendidikan partai politik dari Patricia Smart yang menyebutkan usaha dalam peningkatan partisipatif dan pemahaman ideal tentang politik (Smart & Brownhill, 1988), di luar dari itu pemahaman bukan sekedar wawasan dari kondisi sosial politik yang berda dicakupan lokal saja tetapi juga dengan nasional, setidaknya generasi yang hadir di era keterbukaan informasi ini harus mengerti baik sisi filosofis maupun historis terkait sosial politik nasional juga sebagaimana contoh pemahaman dasar apa itu trias politika yang diterapkan di Indonesia ini, bagaimana pun baik secara kronologis setiap negara memiliki jalur kedialannya sendiri dalam

menentukan konsep berpolitik dan bernegara seperti halnya di Indonesia yang menerapkan trias politika berasal dari konsep Montesquieu dan John Locke (Ruhenda, Mustapa, & Septiadi, 2020). maka peningkatan kualitas pendidikan politik di Kota Jambi merupakan peningkatan yang harus diupayakan

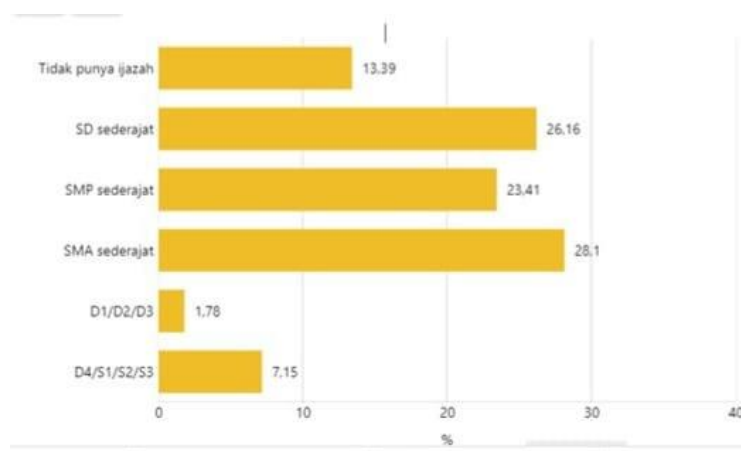
Kualitas dari pendidikan politik di Kota Jambi dapat terlihat dari salah satu hasil jurnal yang diterbitkan oleh Zakarsi dan Dimas Rizal terkait pendidikan politik yang dilaksanakan pada salah satu sekolah favorit di Kota Jambi yaitu SMA Negeri 4 Kota Jambi, dalam jurnal tersebut Rizal melihat dalam segi pemahaman pemilih pemuda belum mengetahui secara komprehensif mengapa pentingnya sebuah partisipatif politik bahkan sampai ke tingkat sangat tidak mengetahui (Zakarsi & Rizal, 2019). Padahal partisipatif dalam politik berpengaruh kepada penerimaan dan juga pengakuan kepada jalannya roda pemerintahan (Hutington, 1984). Jika pemilih pemuda di salah satu SMA favorit di Kota Jambi belum mengetahui secara komprehensif tentang apa peran penting sebuah partisipasi politik maka menandakan bahwasannya pendidikan politik di Kota Jambi sangat diperlukan dalam peningkatannya.

Kota Jambi merupakan ibukota dari provinsi Jambi, Kota Jambi merupakan kota yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kota-kota ataupun kabupaten-kabupaten yang ada di pulau Jawa dan pulau Sumatra, tetapi dengan data 621.365 jumlah penduduk Kota Jambi cukup menjadikan Kota Jambi sebagai kota populasi terbanyak di Provinsi Jambi, walaupun dengan geografis yang tidak begitu besar serta kuantitas penduduk yang relatif kecil bukan berarti Kota Jambi jauh dari hal-hal problematis dan juga kebutuhan khusus terkait otonomi daerah. Kota Jambi juga merupakan kota dengan julukan bumi melayu, hal ini disebabkan oleh adanya pusat kerjaan melayu di tengah Kota Jambi karena adanya pusat pemerintahan di pinggir sungai batanghari menurut sejarah. Jika kita mengeplisitkan, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi jumlah yang masuk menjadi kategori masyarakat generasi milenial Kota Jambi sejumlah 195.442 dan juga generasi Z yang berjumlah 149.900 yang mana dengan jumlah 345.342 jumlah generasi milenial dan juga generasi Z ini merupakan lebih dari setengah jumlah populasi masyarakat Kota

Jambi secara keseluruhan, ini merupakan bentuk pemerenan dalam peningkatan pendidikan politik yang ada di Kota Jambi. Dengan sumber daya manusia yang dimiliki, program atau kebijaksanaan dalam pemerintahan sangat dibutuhkan pembagian wewenang atau pendelegasian yang tepat. Pergeseran sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi didukung oleh UU Otonomi Daerah yang terdiri dari UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberlakukan sejak Januari 2001 (Herawaty, 2011)

Namun data tersebut tidak terbesit sebagai sebuah data yang konkrit jika kita ingin melihat sebuah angka tersebut yang menjadi seluruhnya untuk melakukan pendidikan politik, karena bisa saja perbedaan dalam pendalaman disiplin ilmu. Kembali lagi menurut data BPS Kota Jambi hanya 7,15 % masyarakat Kota Jambi yang memiliki ijazah S1/ sederajat, hal itu tentu harus terhindar dari konteks pengaruh karena targeting program terkait pendidikan politik saja belum konkrit jika melihat kuantitas lulusan 7, 15 % tersebut, ada data data lain terkait penunjang yang mampu menjalani aktor pendidikan politik ini yaitu mahasiswa yang berkaitan dan berkapasitas tentang pendidikan politik dan juga lulusan 7, 15 % ini secara data yang mampu melakukan penyebaran terkait politik ideal di Kota Jambi.

Gambar 1. 1 Data Kepemilikan Ijazah Masyarakat Kota Jambi Usia 15 Tahun ke atas pertahun 2020



Sumber: databoks

Di luar data kepemilikan ijazah masyarakat Kota Jambi, baik instansi formal maupun non formal sangat menjadikan pendidikan politik sebagai salah satu aspek pendidikan yang penting, khususnya dalam kegiatan kajian keislaman dan juga kegiatan kedinasan yang berkaitan dengan politik. Masyarakat Kota Jambi 95, 07% beragama Islam hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh data (Kusnandar, 2021) yang juga mengutip dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dari Kementerian Dalam Negeri (kemendagri). Dengan data tersebut pendidikan politik dengan pemahaman keagamaan menjadi salah satu segmentasi pendidikan politik yang efektif, dengan tidak melupakan pendidikan politik lainnya seperti berbasis Undang-Undang, etika dan juga norma norma adat Melayu.

**Gambar 1. 2 Data Jumlah Penduduk Jambi Menurut Agama/Kepercayaan
(Juni 2021)**



Jumlah Penduduk Jambi Menurut Agama/Kepercayaan (Juni 2021)

☰ ☐

No.	Nama Data	Nilai
1	Islam	3.381.844
2	Kristen	116.915
3	Buddha	34.429
4	Katolik	20.649
5	Aliran Kepercayaan	1.953
6	Konghucu	801
7	Hindu	482

Sumber : Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dari Kementerian dalam Negeri (kemendagri).

Tabel 1. 1Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Jambi

Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
15.71.09	<u>Alam Barajo</u>	5	Kelurahan	<u>Bagan Pete</u> <u>Beliung</u> <u>Kenali Besar</u> <u>Mayang</u> <u>Mangurai</u> <u>Rawa Sari</u>
15.71.10	<u>Danau Sipin</u>	5	Kelurahan	<u>Legok</u> <u>Murni</u> <u>Selamat</u> <u>Solok Sipin</u> <u>Sungai Putri</u>
15.71.06	<u>Danau Teluk</u>	5	Kelurahan	<u>Olak Kemang</u> <u>Pasir Panjang</u> <u>Tanjung Pasir</u> <u>Tanjung Raden</u> <u>Ulu Gedong</u>
15.71.02	<u>Jambi Selatan</u>	5	Kelurahan	<u>Pakuan Baru</u> <u>Pasir Putih</u> <u>Tambak Sari</u> <u>The Hok</u> <u>Wijaya Pura</u>
15.71.03	<u>Jambi Timur</u>	9	Kelurahan	<u>Budiman</u> <u>Kasang</u> <u>Kasang Jaya</u> <u>Rajawali</u>

Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
				<u>Sejinjang</u> <u>Sulanjana</u> <u>Talang Banjar</u> <u>Tanjung Pinang</u> <u>Tanjung Sari</u>
15.71.08	<u>Jelutung</u>	7	Kelurahan	<u>Cempaka Putih</u> <u>Handil Jaya</u> <u>Jelutung</u> <u>Kebun Handil</u> <u>Lebak Bandung</u> <u>Payo Lebar</u> <u>Talang Jauh</u>
15.71.07	<u>Kota Baru</u>	5	Kelurahan	<u>Kenali Asam Atas</u> <u>Kenali Asam Bawah</u> <u>Paal Lima</u> <u>Simpang Tiga</u> <u>Sipin</u> <u>Sukakarya</u>
15.71.11	<u>Paal Merah</u>	5	Kelurahan	<u>Eka Jaya</u> <u>Lingkar Selatan</u> <u>Paal Merah</u> <u>Payo Selincih</u> <u>Talang Bakung</u>
15.71.04	<u>Pasar Jambi</u>	4	Kelurahan	<u>Beringin</u>

Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Status	Daftar Kelurahan
				<u>Orang Kayo Hitam</u> <u>Pasar Jambi</u> <u>Sungai Asam</u>
15.71.05	<u>Pelayangan</u>	6	Kelurahan	<u>Arab Melayu Jelmu</u> <u>Mudung Laut</u> <u>Tahtul Yaman</u> <u>Tanjung Johor Tengah</u>
15.71.01	<u>Telanaipura</u>	6	Kelurahan	<u>Buluran Kenali</u> <u>Pematang Sujur</u> <u>Penyengat Rendah</u> <u>Simpang Empat Sipin</u> <u>Telanaipura</u> <u>Teluk Kenali</u>
	TOTAL	62		

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Seperti yang telah di ketahui dengan kuantitas generasi milenial dan generasi Z yang dimiliki Kota Jambi, sangat di perlukan untuk melakukan penelitian terhadap pemerananan generasi milenial dan generasi Z di Kota Jambi, hal ini di tujukan untuk menjadi landasan ilmiah dalam melaksanakan pendekatan dalam upaya meningkatkan pendidikan politik di Kota Jambi. Kota Jambi tersendiri menjadi kota yang menarik perhatian karena permasalahan Kota Jambi juga cukup

kompleks dan juga permasalahan yang cukup berbeda jika di bandingkan dengan kota kota besar lainnya di pulau Jawa. Oleh karenanya peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Peran Generasi Milenial dan Generasi Z Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat Kota Jambi”** yang memiliki tujuan untuk mengetahui formulasi bagaimana yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat Kota Jambi dan peran apa yang efektif bagi generasi milenial dan generasi Z untuk pendidikan politik.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah di paparkan di atas, peneliti mengambil rumusan masalah :

1. Bagaimana Peran partisipasi masyarakat Kota Jambi Generasi Milenial dan juga Generasi Z dalam peningkatan kualitas Pendidikan Politik?
2. Bagaimana Tantangan Generasi Milenial dan Generasi Z Dalam Perwujudan Pendidikan Politik Masyarakat Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran serta kontribusi masyarakat generasi milenial dan generasi Z dalam meningkatkan pendidikan politik Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui tantangan generasi milenial dan generasi Z dalam melaksanakan pendidikan politik di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut;

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami penting nya pemahaman politik ideal dan pendidikan politik.

b. penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi serta bahan pelengkap untuk penelitian selanjutnya dalam pemahaman serta peningkatan aktualitas pendidikan politik Kota Jambi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat di gunakan bagi generasi milenial dan generasi Z yang ingin menjadikan sebuah landasan dalam menggerakan secara ideal pendidikan politik kota Jambi

b. Bagi Peneliti

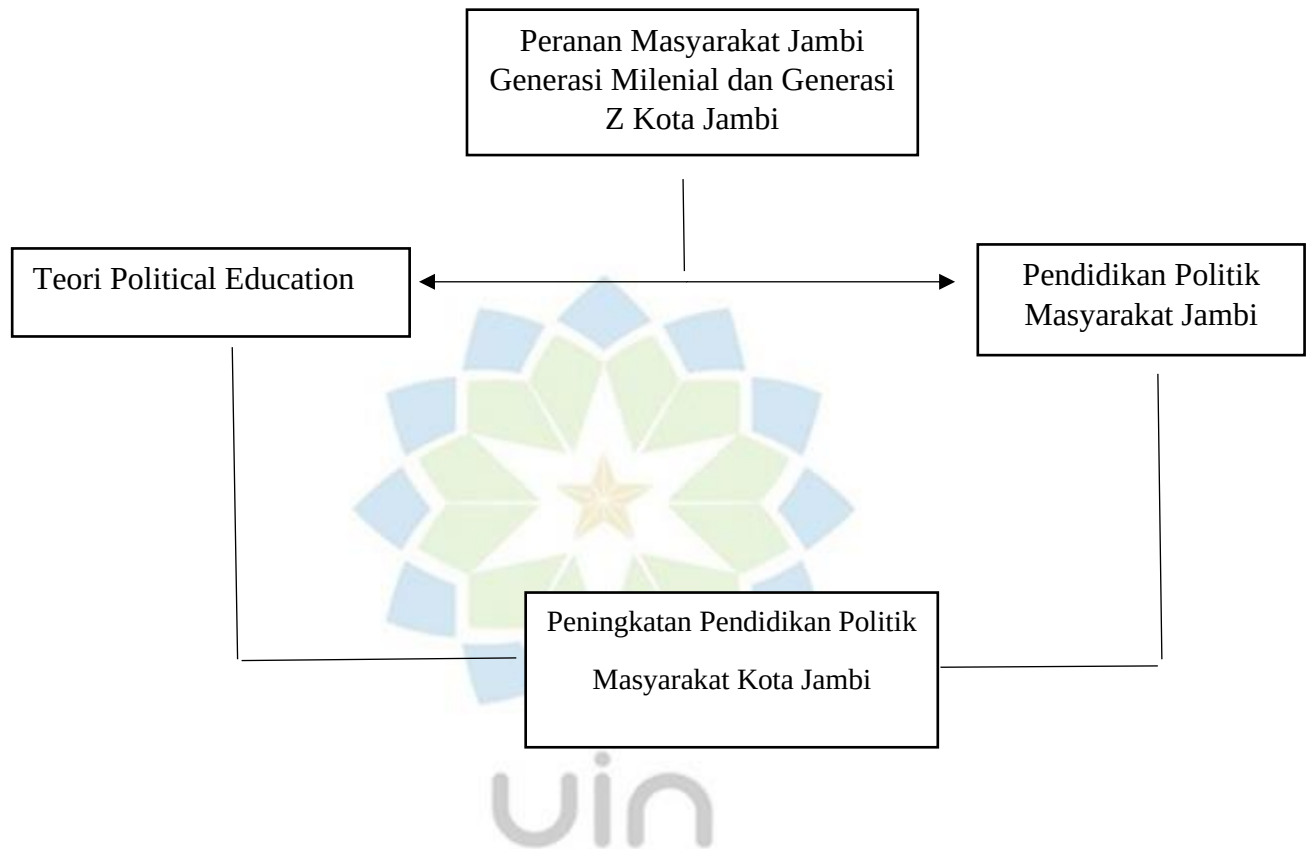
Sebagai proses pelaksanaan fungsi penelitian sebagaimana yang telah tertuang dalam prinsip dasar tri dharma perguruan tinggi

1.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan awal mengenai fenomena-fenomena yang sedang terjadi ataupun sedang berlangsung pada objek yang terjadi pada permasalahan dalam sebuah penelitian. Dalam konteks penelitian ini kerangka berfikir yang di gunakan sebagai berikut:



Bagan 1. 1 Kerangka Berfikir



Bagan diatas menunjukkan bahwa kerangka berpikir dari penelitian ini merupakan penelitian yang berlandaskan teori seputar pendidikan politik, yaitu *Political education* oleh Patricia Smart, yang mana pada teorinya menunjukan beberapa konsekuensi yang harus di perhatikan dalam penerapan pendidikan politik yang ideal diantaranya berasal dari **Debat, Dasar Moral dan Pendidikan liberal dalam sebuah penialaian pendidikan.** Serta menunjukan sebuah korelasi dari sebuah teori dalam pelaksanaan sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai yaitu peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Kota Jambi

1.6 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian ini berjudul *The Role of Political Parties In Conducting Political Education (2017)* karya Payerli Pasaribu.yang mana penelitian ini

berkaitan dengan pendidikan politik dan juga berkaitan dengan konteks pemeranan sebuah aspek kemasyarakatan dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas juga pemaknaan kata peran secara substantif serta korelasinya dengan pendidikan politik yang di titik beratkan kepada partai politik, Dalam penelitiannya Payerli Pasaribu menekankan akan adanya peran penting sebuah partai politik dalam menjalankan pendidikan politik, ia menyimpulkan bahwasannya partai politik memiliki peran menyalurkan kader yang mampu mengajar orang yang berbakat dalam peningkatan partisipasi politik dan juga pendidikan politik.

Kedua, penelitian ini berjudul *Pendidikan Politik di Era Disrupsi (2018)* karya Khoiruddin Bashori, penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan pendidikan politik serta beberapa tantangannya di era disrupsi, penelitian yang cukup berkaitan dengan penelitian ini karena sama sama mengarahkan konteks ke era disrupsi yang mana era disrupsi merupakan era yang penuh transformasi perubahan di semua aspek secara tidak terduga yang terkesan sangat cepat, era ini yang mengharuskan interaksi untuk berubah secara cepat. Penelitian ini sama menggunakan metode kualitatif. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwasannya penerapan pendidikan politik di era disrupsi berbeda dengan era sebelumnya yang bersifat monolitik, satu arah dan juga doktrinatif, kini pendidikan politik bersifat lebih terbuka dan juga lebih mengutamakan interaksi serta melibatkan semua pemangku kepentingan

Ketiga, penelitian ini berjudul *Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (2017)* oleh Triono, penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif serta mengutamakan bagaimana pemeranan pesta demokrasi serta pemilu mempengaruhi bentuk akan hadirnya pendidikan politik di masyarakat, penelitian ini mengatakan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan dinamis dalam mendukung kebijaksanaan pemerintahan merupakan dampak dari sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah.

Keempat, penelitian ini berjudul *Pendidikan Politik, Persepsi, kepemimpinan, Dan Mahasiswa*.(2019) Penelitian ini merupakan penelitian yang di tulis oleh Dudih Sutrisman, S.Pd yang mana menggunakan metode penelitian kualitatif pula.Memiliki korelasi penelitan dengan tersebut karena menggunakan aspek kemasyarakatan milenial dan gen Z dalam korelasi kemahasiswaannya. Penelitian ini juga menghasilkan bahwasannya dengan persepsi pendidikan politik bagi seorang mahasiswa dalam mengutamakan penempatan aktor utama dalam pendidikan politik

Kelima, penelitian ini berjudul *Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada(studi pada pilkada bupati di kabupaten Kuningan*(2019) oleh Cecep Naha Nasuha, penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dalam penelitiannya, yang mana juga peneltian ini menunjukkan bahwasannya pendidikan politik berpengaruh dalam politik daerah. Penelitian beliau menyebutkan bahwasannya pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi politik menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kabupaten Kuningan yang didapat dari pendidikan politik memberikan kontribusi yang rendah kepada kegiatan partisipasi politik dalam pilkada.Masyarakat mengikuti kegiatan partisipasi secara aktif dalam pilkada merupakan bentuk kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri.